

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk membangun sebuah demokrasi yang kuat dan stabil, karena masyarakat menjadi unsur utama yang dapat digunakan untuk menentukan berhasil tidaknya suatu pemerintahan pada sistem demokrasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan penyusunan kebijakan sebagai bentuk dari partisipasi politik. Melalui partisipasi dari masyarakat ini, dapat dijadikan parameter untuk menilai bagaimana tingkat demokrasi di sebuah negara. Bentuk partisipasi yang bisa dilakukan oleh masyarakat salah satunya berupa memberikan hak suaranya sebagai pemilih dalam Pemilu. Sebagai pemilih, masyarakat berarti ikut serta dalam memberikan perannya untuk menentukan arah dan kebijakan negara ke depan. Jadi, dalam Pemilu berarti memberikan wadah bagi masyarakat untuk dapat menentukan arah kepemimpinan negara maupun daerah dengan cara mereka menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin mereka kedepannya. Para pemimpin yang telah terpilih nantinya akan sangat menentukan baik buruknya daerah atau negara yang mereka pimpin ke depan.

Dalam proses Pemilihan ini tidak semua warga dapat memberikan suaranya, melainkan terdapat berbagai syarat dan ketentuan bagi warga yang tergolong pada kelompok pemilih. Warga negara yang masuk dalam kategori pemilih dalam Pemilu yaitu mereka yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Bagi mereka yang sudah memenuhi syarat tersebut

memiliki hak untuk berperan serta mengikuti pendidikan politik, ikut serta dalam setiap tahapan Pemilu, menerima serta memberikan informasi terkait dengan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (PKPU No. 9 Tahun 2022 pasal 8). Meskipun warga sudah memenuhi ketentuan sebagai pemilih, namun sebelumnya perlu memastikan dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih tetap karena hanya warga yang sudah terdaftar dalam DPT saja yang boleh memilih dalam Pemilu. Apabila warga sudah memenuhi syarat dan sudah terdaftar dalam DPT maka perlu dan wajib untuk berpartisipasi dalam Pemilu, karena menjadi hak mereka untuk dapat menentukan dengan cara memilih pemimpin dan wakil rakyat yang kedepannya akan memimpin mereka. Selain itu menjadi kewajiban dan tanggung jawab bagi mereka untuk berpartisipasi dalam Pemilu karena melalui hal ini warga dapat menunjukkan bagaimana kepedulian mereka terhadap bangsa dan negaranya, sebab wargalah yang akan menentukan masa depan bangsa dan negara sendiri.

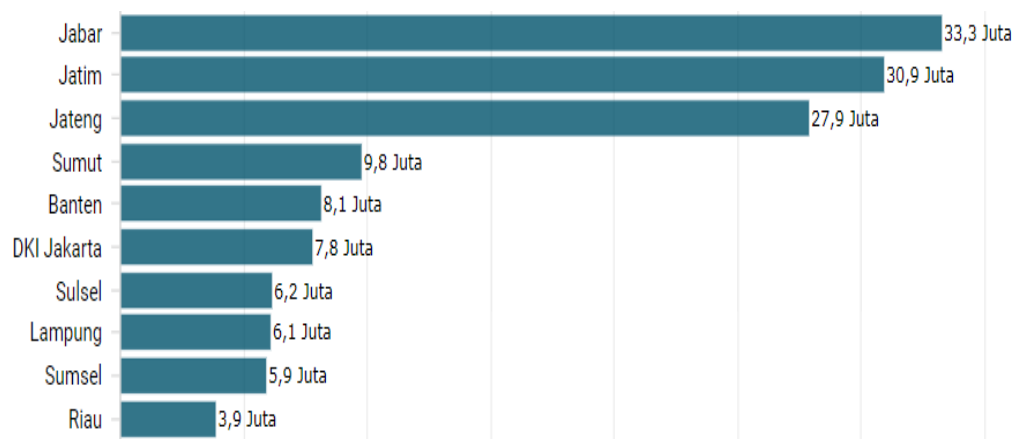
Hak memilih yang diberikan oleh negara tersebut menjadi pernyataan kedaulatan rakyat dalam hal pengelolaan urusan publik, hal ini berarti warga negara yang ikut berpartisipasi sebagai pemilih menjadi bagian dari representasi kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam konsep negara demokrasi. Maksud kedaulatan rakyat ini adalah bahwa menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat. Pemilu yang demokratis tidak selalu simbolis, tetapi mereka adalah Pemilu yang kompetitif, periodik, inklusif, dan definitif di mana para pembuat keputusan dalam suatu pemerintahan dipilih oleh warga negara yang memiliki kebebasan dalam mengkritik pemerintah, kebebasan dalam menyampaikan kritiknya, serta

memberikan alternatif terhadap apa yang menjadi kekurangan dari para pembuat keputusan tersebut (Kirkpatrick 1984). Dalam hal ini menunjukkan bahwa keputusan utama yang diambil dalam pemerintahan dipegang oleh warga negara sebagai pemilik kedaulatan. Warga negara sebagai pemilik kedaulatan juga harus menjalankan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, karena ini sebagai bentuk patuh terhadap sistem negara. Negara memberi hak dan kewajiban kepada warga salah satunya untuk ikut serta dalam proses Pemilu, warga diperbolehkan untuk ikut berpartisipasi sebagai pemilih, peserta, maupun ikut serta sebagai penyelenggaranya dan semua yang terlibat dalam Pemilu ini harus mendapatkan perlakuan hukum yang setara.

Adanya partisipasi dari warga negara dalam proses Pemilu ini sangat penting, karena selain untuk melihat bagaimana kepedulian warga terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negaranya, tingkat partisipasi Pemilu warga juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana kualitas Pemilu itu diselenggarakan. Perlu kita ketahui bahwa partisipasi ini bukan sekedar seberapa banyaknya warga yang memilih dan datang ke TPS tapi sejauh mana penggunaan hak pilih oleh warga itu dilakukan atas dasar sebagai pemilih. Dapat dipastikan bahwa seorang warga negara yang aktif ikut serta dalam Pemilu berarti merekalah orang-orang yang peduli dengan nasib daerah maupun negaranya dan memiliki rasa nasionalisme dan cinta tanah air yang tinggi.

Namun pada kenyataannya mulai Pemilu pertama dilakukan hingga saat ini partisipasi dari masyarakat mengalami banyak penurunan. Seperti pada kasus Pemilu tahun 2019, tingkat partisipasi Pemilu berdasarkan data BPS hanya mencapai 81,69% saja, dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 192,77

juta pemilih namun yang menggunakan hak pilihnya hanya 157,48 juta pemilih. Sebanyak 35,3 juta warga sebagai pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Dari data ini peneliti mengambil salah satu provinsi yaitu Provinsi Jawa Tengah yang ternyata masuk dalam 10 provinsi dengan tingkat partisipasi terendah di Indonesia. Padahal berdasarkan data dari KPU, jumlah DPT pada Pemilu 2019 Jawa Tengah menempati posisi ketiga dengan jumlah daftar pemilih terbanyak di Indonesia, namun hal ini sangat berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi jika Jawa Tengah menjadi 10 provinsi dengan tingkat partisipasi pemilih terendah di Indonesia pada Pemilu 2019. Berikut ini merupakan data jumlah DPT pada Pemilu 2019.



Gambar 1.1

Jumlah DPT Pemilu 2019

Sumber : kpu.go.id dan databoks.kadata.go.id

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah DPT mencapai 27,9 juta orang yang seharusnya menjadikan peluang bagi Provinsi ini untuk dapat memberikan partisipasi pemilih yang tinggi juga. Data terbaru juga menunjukkan bahwa DPT untuk Pemilu 2024 mendatang Jawa Tengah masih tetap

berada di urutan ketiga dengan jumlah pemilih terbanyak, bahkan jumlahnya meningkat yaitu 28,3 juta pemilih. Dari permasalahan inilah membuat peneliti tertarik untuk mengetahui lebih jauh faktor apa yang menyebabkan partisipasi masyarakat dalam Pemilu masih rendah khususnya di daerah Provinsi Jawa Tengah dengan fokus penelitian di Kabupaten Wonogiri pada periode Pemilihan Umum tahun 2020 yang merupakan pemilihan kepala daerah atau Bupati saat itu. Perlu kita ketahui bahwa Kabupaten Wonogiri bertempat di Provinsi Jawa Tengah tepatnya berada di sebelah selatan Kota Solo dan berada diantara dua provinsi yaitu Jawa Timur dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah ini penulis pilih karena menjadi salah satu penyumbang rendahnya partisipasi pemilih dalam Pemilu di Jawa Tengah. Menurut data terbaru dari BPS, jumlah penduduk Kabupaten Wonogiri terhitung pada tahun 2022 adalah sebanyak 1.057.087 jiwa. Jumlah ini menunjukkan penduduk yang cukup besar bagi sebuah kabupaten, hal ini juga ditunjukkan dari data jumlah daftar pemilih tetap pada Pemilihan kepala daerah Tahun 2020 di Kabupaten Wonogiri sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Pemilih Tetap

	PILKADA 2020
Laki-laki	414.357
Perempuan	422.041
Jumlah DPT	836.398

Sumber : KPU wonogiri

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Wonogiri diatas terlihat bahwa jumlah pemilih dalam pemilihan kepala daerah Tahun 2020 menunjukkan angka yang cukup besar. Menurut Yunus anggota Komisi A DPRD Jateng menyatakan bahwa sebenarnya jumlah pemilih di Wonogiri sangat besar, terlebih

Wonogiri menjadi salah satu daerah terluas di Jawa Tengah. Namun, tingkat partisipasi di daerah ini masih sangat minim. Menurutny, tingkat partisipasi dengan jumlah pemilih potensial sangat tidak seimbang.

Berdasarkan data yang peneliti temukan, dalam tiga kali pelaksanaan Pilkada di Wonogiri, tingkat partisipasinya selalu kurang dari 70 persen. Pelaksanaan ini terjadi pada Pilkada yang pertama kali digelar yaitu tahun 2005 dengan tingkat partisipasi pemilih 69 persen. Pelaksanaan kedua terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah partisipasi yang menurun, yaitu 65,57 persen, serta pada Pilkada 2015 naik tipis yaitu di angka 66,08 persen. Padahal ketiga Pilkada ini terjadi dalam kondisi normal, berbeda pada Pilkada tahun 2020 yang terjadi pada masa pandemi covid 19 yang justru tingkat partisipasinya mencapai 71,08 persen. Hal ini menjadi catatan partisipasi tertinggi dalam sejarah penyelenggaraan Pilkada di Wonogiri. Meskipun sudah mencapai diatas 70 persen, namun angka ini belum bisa mencapai pada nilai target nasional yang ditetapkan oleh KPU yaitu sebesar 77,5%. Bahkan tingkat partisipasi masyarakat Wonogiri pada Pilkada yang baru saja dilaksanakan pada tahun 2024 hanya menyentuh angka 69% saja.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Wonogiri ini dilaksanakan pada hari Rabu, 9 Desember Tahun 2020. Pada tahun ini Indonesia bahkan dunia sedang dilanda wabah Covid-19 yang ditetapkan sebagai pandemi global. Tahun 2020 ini menjadi tahun yang berbeda untuk penyelenggaraan Pilkada dibanding dengan penyelenggaraan pada tahun-tahun sebelumnya, karena dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan prosedur khusus yang memperhatikan protokol kesehatan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat tetap menggunakan hak pilihnya dengan rasa aman dan tanpa takut adanya penularan covid-19 tersebut.

Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh KPU, tingkat partisipasi pemilih di Wonogiri cenderung rendah karena diantaranya disebabkan oleh banyaknya *kaum boro* atau biasa disebut sebagai kaum perantauan. Selain itu permasalahan pada masyarakat lanjut usia dan disabilitas yang berdomisili di daerah yang geografisnya sulit membuat mereka enggan untuk pergi ke TPS memberikan hak pilihnya. Faktor pertama yang menyebabkan rendahnya partisipasi pemilih di Wonogiri rendah, karena banyak warga yang memilih untuk merantau atau bekerja di kota lain. Pemerintah Kabupaten Wonogiri menyebutkan bahwa jumlah perantau saat ini sebesar 35 persen, yaitu sekitar 350.000 jiwa. Ada berbagai alasan mengapa warga memilih merantau daripada tetap tinggal di daerah kelahiran mereka. Alasan pertama karna dilihat dari angka UMK Kabupaten Wonogiri yang menjadi peringkat kedua terbawah di Provinsi Jawa Tengah yaitu Rp1.968.448,32. Hal ini membuat warga memilih bekerja diluar kota dengan tingkat UMK yang lebih tinggi, walaupun hal itu tidak menjamin karena jika UMK tinggi pasti tingkat biaya hidupnya pun juga tinggi.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada salah satu perantau, mengatakan bahwa prospek kerja di luar Wonogiri lebih menjanjikan dan menilai jika lapangan kerja di Wonogiri juga belum terlalu banyak. Sebagian besar warga yang merantau juga mengungkapkan mereka enggan untuk bekerja sebagai petani, karena mayoritas masyarakat di Wonogiri bekerja sebagai petani. Mereka lebih memilih untuk bekerja sebagai pedagang seperti bakso dan jamu maupun bekerja sebagai pegawai ASN atau BUMN dengan harapan bisa merubah nasib di tempat perantauan. Dari hal ini ditemukan fakta juga bahwa pertanian dalam sektor pekerjaan menjadi penyumbang tertinggi dalam angka kemiskinan di Wonogiri

yaitu 29,95 persen. Persentase penduduk miskin di Wonogiri pada tahun 2022 tercatat sebesar 10,99 persen yaitu masih ada 105.190 penduduk miskin. Dari jumlah penduduk miskin tersebut, hampir sepertiganya bekerja pada sektor pertanian.

Permasalahan perantau dalam kegiatan Pemilu ini sebenarnya bisa diatasi ketika warga perantau dapat pulang terlebih dahulu atau dapat memindahkan tempat memilihnya di lokasi mereka merantau. Namun pemindahan lokasi memilih hanya bisa dilakukan apabila pemilihan dalam skala nasional seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jika dalam pemilihan kepala daerah perantau mau tidak mau harus pulang ke tempat tinggalnya untuk memberikan hak suaranya. Permasalahan yang terjadi disini adalah banyak dari kaum perantau ini yang tidak mau pulang dengan alasan tidak menerima informasi dengan lengkap dan waktu yang tidak memungkinkan untuk balik kampung karena urusan pekerjaan mereka di perantauan. Selain itu banyak dari mereka yang tidak mau untuk pindah tempat memilih sehingga banyak yang tidak memberikan suaranya saat Pemilu atau golput. Perlu diketahui juga jika pesta demokrasi atau kegiatan pemilihan ini pasti dilakukan pada hari kerja bukan saat akhir pekan, sehingga alasan karena pekerjaan pun sebenarnya menjadi hal yang wajar dilontarkan oleh para perantau.

Urgensi dari penelitian ini adalah jika masalah tidak diatasi maka proses demokrasi pasti akan terhambat, karena tanpa adanya partisipasi, demokrasi ini tidak akan berarti apapun. Calon pejabat publik pasti dipilih melalui partisipasi masyarakat, apabila tanpa adanya partisipasi maka proses memilih dan dipilih juga tidak akan bisa berlangsung dan Pemilu dapat dikatakan gagal. Dalam konteks partisipasi politik pada Pemilu, dapat dilihat dari perspektif pendekatan budaya

masyarakat atau *civic culture* yaitu partisipasi politik dalam proses Pemilu menjadi salah satu indikator untuk mengukur bagaimana kualitas demokrasi yang berkaitan dengan legitimasi hasil Pemilu dan bagaimana tingkat dukungan warga pada pemerintah melalui hasil Pemilu. Jadi semakin banyak warga yang ikut dalam memberikan hak suaranya pada Pemilu, maka hal ini berindikasi semakin kuatnya legitimasi demokrasi.

Daya tarik dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana keikutsertaan dari *kaum boro* asal Wonogiri untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilu. *Kaum boro* atau perantau ini pastinya merupakan warga negara yang diberikan hak serta kewajiban untuk ikut serta atau berpartisipasi dalam Pemilu, namun sebagai perantau yang bekerja bukan di daerah asalnya membuat mereka kesulitan jika harus pulang pergi hanya untuk memberikan hak pilihnya dalam Pemilu. Beberapa dari mereka yang merantau memilih untuk meninggalkan kewajibannya sebagai warga negara yang seharusnya memberikan suaranya dalam Pemilu dengan berbagai alasan yang salah satunya karena masalah pekerjaannya di tempat perantauan. Perantau ini adalah mereka yang sudah memasuki usia pekerja yaitu diatas 15 tahun, berikut ini merupakan data yang diperoleh dari BPS Kabupaten Wonogiri.

Tabel 1.2
Jumlah usia pekerja

Tahun	2018	2019	2020
Penduduk berusia 15 tahun atau lebih	769.495	774.280	780.177
Angkatan Kerja	577.061	539.433	582.733
Jumlah bekerja	563.887	525.718	557.865
Jumlah menganggur	13.175	13.715	24.868

Sumber : wonogirikab.bps.go.id

Dari data terlihat bahwa jumlah usia angkatan kerja di Kabupaten Wonogiri pada tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan jumlah yang cukup tinggi. Dari jumlah tersebut, diketahui bahwa sejumlah 350.000 orang penduduk Wonogiri memilih untuk menjadi perantau.

Untuk mendukung bahasan terhadap permasalahan ini, peneliti berusaha untuk mencari beberapa penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap permasalahan yang dibahas pada penelitian, yang bertujuan untuk mendukung proses penelitian serta sebagai teori pendukung. Dari penelitian terdahulu yang penulis dapatkan yaitu berjudul Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Kelam Permai dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 (Mulyadi dkk, 2018), dalam penelitian ini membahas mengenai faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat yang cenderung menurun.

Penelitian kedua dengan judul Partisipasi politik masyarakat Adat Baduy dalam Pemilihan Umum (Chairani, 2022), yang membahas mengenai tingkat partisipasi masyarakat adat Baduy yang dalam proses partisipasinya terkait erat dengan struktur politik adat tradisionalnya. Penelitian ketiga dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar (Arinti, N. K, 2020) yang membahas bagaimana partisipasi masyarakat Kota Denpasar serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Penelitian terakhir dengan judul Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020 (Lumasuge, dkk, 2023), yang membahas faktor yang menjadi penyebab partisipasi masyarakat Kecamatan Malalayang yang tinggi.

Dari keempat penelitian terdahulu ini terdapat persamaan yaitu penelitian hanya difokuskan pada satu tahun periode pemilihan saja, serta menjelaskan bagaimana tingkat partisipasi di daerah atau dikelompok tersebut bisa terjadi. Pada penelitian kali ini penulis lebih melihat bagaimana tingkat partisipasi pemilih khususnya pada *kaum boro* atau perantau dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah tahun 2020 di Kabupaten Wonogiri. Penelitian yang penulis lakukan ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan, karena dalam penelitian ini memiliki fokus pada bagaimana partisipasi kelompok perantau di Kabupaten Wonogiri ketika dilaksanakannya Pilkada 2020.

Melihat tingkat partisipasi pemilih di Kabupaten Wonogiri masih memiliki sedikit masalah, yaitu belum tercapainya target partisipasi nasional, hal ini tentu menjadi perhatian dalam hal ini oleh KPU serta seluruh elemen masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang memiliki tanggung jawab bersama. Penulisan skripsi ini digunakan untuk mencari tahu bagaimana partisipasi dari perantau asal Wonogiri ketika pelaksanaan Pilkada dilangsungkan serta untuk melihat faktor apa yang mempengaruhi dan menghambat partisipasi perantau tersebut ketika pelaksanaan Pemilu khususnya pada Pilkada tahun 2020. Selain itu penelitian ini juga digunakan untuk melihat bagaimana tindakan pemerintah untuk menekan jumlah *kaum boro* serta melihat bagaimana cara yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan partisipasi *kaum boro* dalam Pilkada 2020.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana partisipasi penggunaan hak memilih *kaum boro* dalam Pilkada tahun 2020 di Kabupaten Wonogiri?
2. Apa yang mempengaruhi partisipasi *kaum boro* dalam Pilkada Tahun 2020?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis partisipasi penggunaan hak memilih *kaum boro* dalam Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Wonogiri.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi *kaum boro* dalam Pilkada tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Bagi peneliti :
 - Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian selanjutnya, agar dapat dilakukan penyempurnaan dalam segala aspek.
2. Bagi pembaca :
 - Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada para pembaca tentang bagaimana pentingnya memberikan suara mereka dalam Pemilu.

- Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi pembaca mengenai bentuk ikut serta masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian tentang partisipasi *kaum boro* sebagai pemilih di Kabupaten Wonogiri ini bisa menjadi masukan bagi pemerintah untuk dapat memberikan solusi serta cara-cara terbaik untuk dapat diterapkan agar tingkat partisipasi pemilih terutama oleh *kaum boro* karena tingkat perantau di Kabupaten Wonogiri cukup tinggi, sehingga tingkat partisipasi bisa mencapai target nasional.

1.5 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang berjudul “Partisipasi Hak Memilih *Kaum Boro* dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Kabupaten Wonogiri ” peneliti dapatkan beberapa penelitian terdahulu yang sejenis dan berkaitan dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Penelitian terdahulu ini peneliti ambil untuk mencari perbandingan antar penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian yang saat ini dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu ini peneliti gunakan agar dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian pertama yang peneliti ambil dengan judul “Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Kecamatan Kelam Permai dalam Pilkada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018” (Mulyadi dkk.,2018). Penelitian ini dilakukan sebab adanya rasa prihatin terhadap jumlah partisipasi politik masyarakat Kalimantan Barat dalam

proses Pemilu yang cenderung turun. Penelitian ini difokuskan pada partisipasi masyarakat Kecamatan Kelam Permai untuk mengetahui kendala apa yang menyebabkan partisipasinya rendah, serta bagaimana upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala terkait partisipasi masyarakat dalam Pemilu Kecamatan Kelam Permai.

Dari banyaknya warga yang memilih terdapat kendala yang ditemukan oleh penulis diantaranya pemilih yang cenderung memilih berdasarkan agama dan suku, jadi mereka memilih berdasarkan kesamaan itu. Selain itu kendala yang dialami paling banyak terkait adanya rasa kecewa dari masyarakat akibat janji-janji politik para kandidat dalam pemilihan tahun-tahun lalu yang ketika masa kepemimpinannya ternyata tidak terpenuhi. Selain dari faktor eksternal, ada faktor lain yang berasal dari internal warga yang tidak mau ikut berpartisipasi dalam Pemilu. Mereka memberi alasan karena jauhnya rumah dari lokasi TPS, alasan tidak bisa meninggalkan pekerjaan, bahkan ada yang memang benar-benar tidak mau memberikan suaranya dalam Pemilu. Kendala-kendala ini dijelaskan oleh penulis dalam penelitiannya berdasarkan hasil wawancara kepada warga dan tokoh masyarakat di desa yang ada di Kecamatan Kelam Permai. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif.

Penelitian kedua yang peneliti ambil berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat Adat Baduy dalam Pemilihan Umum” (Chairani 2022). Penelitian ini dilakukan karena melihat masyarakat Baduy yang dalam memberikan partisipasinya dalam Pemilu sangat terikat dengan struktur politik tradisional mereka. Selain itu, keterwakilan dari masyarakat adat sangat penting ditengah krisis representasi di lembaga politik formal melalui kontestasi elektoral. Dalam penelitian ini penulis

menjelaskan pertimbangan apa saja yang membuatnya memilih partisipasi politik masyarakat Baduy, yang pertama karena dari masyarakat Baduy ini merupakan kelompok minoritas di Banten. Mereka memiliki cara pandang untuk berpolitik dan menjalankan kehidupan sehari-harinya dengan masih memegang unsur adat. Alasan kedua karena partisipasi masyarakat Baduy tidak bisa lepas dari struktur adat. Ketiga, karena dalam proses Pemilihan atau Pemilu partisipasi dari masyarakat Baduy cenderung rendah.

Dalam penelitian ini juga disebutkan beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan pada pelaksanaan Pemilu dalam masyarakat Baduy. Pertama adanya larangan untuk melakukan kampanye terbuka serta larangan dalam memasang alat- alat untuk kampanye dalam wilayah Baduy, karena apabila dilakukan dianggap dapat menimbulkan gesekan politik antara masyarakat Baduy. Apabila akan melakukan kampanye maka akan diarahkan untuk datang langsung ke rumah warga disana secara personal. Selain dari permasalahan kampanye, apabila jadwal pelaksanaan Pemilu kebetulan berbarengan dengan acara adat masyarakat Baduy, maka masyarakat Baduy tersebut akan memilih untuk datang ke acara adat mereka daripada datang ke Pemilu. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur, buku, catatan, dan sumber referensi lainnya. Selain itu penelitian ini menggunakan dokumentasi dan data yang merujuk pada bacaan yang relevan.

Penelitian ketiga yang penulis dapatkan berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar” (Arinti, N. K. 2020). Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kuantitatif dengan cara

pengumpulan data secara langsung melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil dari penelitian ini adalah yang pertama bahwa terjadi kenaikan dan penurunan terkait partisipasi pemilih dalam Pemilihan Umum di Kota Denpasar. Kedua, dalam meningkatkan partisipasi politik upaya sosialisasi menjadi bagian paling penting. Penemuan dalam penelitian ini menunjukkan adanya lembaga sosial yang ikut berpengaruh dalam menaik-turunkan partisipasi politik masyarakat yaitu Calon legislatif, Kepala Desa, PPS, dan tokoh agama. Hasil ketiga yang ditemukan peneliti dalam penelitian ini adalah adanya pengaruh antara kedekatan emosional calon pileg dan pilpres dengan persepsi politik masyarakat. Keempat adalah rasionalitas masyarakat yang dapat memberikan pengaruh besar dalam menentukan partisipasi politik.

Dari keempat hasil penemuan dapat disimpulkan bahwa antusias dari masyarakat Kota Denpasar dalam partisipasi politik tinggi. Partisipasi yang tinggi ini disebabkan adanya faktor mobilisasi yang dilakukan oleh calon-calon legislatif. Pada dasarnya, partisipasi politik sudah diterapkan oleh masyarakat Kota Denpasar dalam Pemilihan Umum, namun dalam pelaksanaannya masih kurang tepat karena masih terjadi kegiatan mobilisasi politik. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan 2 teori yaitu teori partisipasi politik dan pilihan rasional.

Penelitian keempat yang peneliti dapatkan berjudul “Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun 2020” (Lumasuge, dkk. 2023). Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Manado dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota menunjukkan kategori tinggi, termasuk juga di Kecamatan Malalayang. Tingginya partisipasi masyarakat Kecamatan Malalayang ini disebabkan oleh beberapa faktor,

salah satunya dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Pada penelitian ini menggunakan teori dari Miriam Budiardjo tentang partisipasi politik yang memuat aspek sebagai berikut : pemberian suara dalam Pemilu, menghadiri rapat umum, dan menjadi anggota partai. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan yang dijelaskan oleh peneliti dalam penelitian ini yaitu :

1. Masyarakat memilih berdasarkan pada faktor kedekatan kepada keluarga serta pada pengurus partai.
2. Kedekatan ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan calon.
3. Dalam berpartisipasi, pemilih pemula dihadapkan oleh beberapa kendala. Kendala internal yaitu karena faktor usia, pemilih ini adalah mereka yang baru pertama kali melakukan Pemilu sehingga mereka merasa takut dan bingung dalam memberikan hak suaranya. Sedangkan faktor eksternal karena padatnya kegiatan pemilih di sekolah seperti ekstrakurikuler maupun kegiatan pembelajaran lainnya.

Dalam penelitian ini peneliti juga memberikan saran seperti penyelenggara Pemilu harus selalu mensosialisasikan tentang pemilihan, kemudian kepada pemerintah desa harus lebih netral dan teliti selama proses pemilihan, serta memberikan saran kepada masyarakat agar lebih melek terhadap berbagai isu-isu politik, dan lain-lain.

1.6 Tinjauan Pustaka

1.6.1 Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan salah satu ciri dari peningkatan status sosial ekonomi masyarakat dan modernisasi politik, sehingga dapat menghasilkan partisipasi yang lebih jelas. Secara harfiah, partisipasi politik berarti keikutsertaan dalam konteks politik, yang mengacu pada keterlibatan atau keikutsertaan warga dalam proses politik. Partisipasi ini mencakup kegiatan dalam kampanye, menentukan pilihan saat pemilu, bahkan menjadi anggota politik atau ormas.

Menurut Miriam (1998:3) partisipasi politik merupakan suatu kegiatan bagi sekelompok atau seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara memilih pemimpin negara yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan yang dilakukan dalam hal ini berupa memberikan suara dalam Pemilu, hadir dalam rapat, menjadi anggota partai, mengadakan hubungan atau lobbying dengan anggota parlemen atau pejabat pemerintah, dan sebagainya. Masyarakat yang berpartisipasi terdorong memberikan suaranya dalam Pemilu karena adanya keyakinan bahwa melalui hal inilah maka kepentingan mereka akan tersalur atau setidaknya akan diperhatikan. Selain itu melalui partisipasi ini maka masyarakat dapat mempengaruhi tindakan pihak berwenang dalam membuat keputusan. Di samping masyarakat yang memiliki kesadaran untuk ikut serta berpartisipasi, terdapat masyarakat yang apati yaitu sama sekali tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik khususnya dalam Pemilu.

Sikap apati ini dapat berarti positif karena memberikan fleksibilitas kepada sistem politik, dibandingkan dengan masyarakat yang aktif berpartisipasi secara berlebihan yang dapat menjurus pada fragmentasi, pertikaian, dan instabilitas sebagai bentuk ketidakpuasan mereka (McClosky). Sikap apati juga dapat dilakukan karena adanya bentuk rasa puas dan percaya terhadap sistem politik yang ada, jadi mereka tidak ikut berpartisipasi karena mereka menganggap bahwa keadaan saat ini yang tidak begitu buruk dan siapa pun yang terpilih tidak akan mengubah apapun. Galen A. Irwan (1975:35) menyimpulkan bahwa dalam beberapa keadaan, rasa puas dari masyarakat menyebabkan tingkat partisipasi yang rendah.

Terdapat jenis-jenis partisipasi politik yang terjadi di lingkungan masyarakat (Milbrath dan Goel dalam Cholisin, 2007) sebagai berikut :

1. Partisipasi politik apatis, mereka yang tidak berpartisipasi karena sikap acuh tak acuhnya terhadap kegiatan politik, bahkan mereka tidak memiliki ketertarikan dan keingintahuan mengenai kegiatan politik.
2. Partisipasi politik spectator, merupakan jenis partisipasi ketika seseorang atau masyarakat setidaknya pernah ikut dalam kegiatan politik dalam hidupnya. Contohnya pada masyarakat yang hanya ikut di Pemilu saja.
3. Partisipasi politik gladiator, merupakan jenis partisipasi ketika masyarakat aktif ikut serta di kegiatan politik seperti menjadi aktivis partai, pekerja kampanye, dan lain-lain.
4. Partisipasi politik pengkritik, merupakan jenis partisipasi yang diartikan sebagai bentuk kegiatan yang tidak konvensional dalam kegiatan politik.

Dalam pembahasan ini partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat adalah dalam bentuk pengambilan keputusan, jadi masyarakat wajib andil dalam pengambilan keputusan pemilihan pemimpin baru. Partisipasi politik ini juga didefinisikan sebagai kegiatan warga yang berupaya mempengaruhi struktur pemerintahan, yaitu pemilihan otoritas pemerintah, atau kebijakan dari pemerintah (Conway, 2000).

Lester Walter Milbrath (1965) dalam bukunya “Political Participation” membagi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum yaitu:

1. Faktor stimulasi politik, faktor ini terdiri dari kesadaran politik, kepentingan politik, kepercayaan politik, dan iklim politik. Masyarakat yang memiliki kesadaran akan empat hal tersebut cenderung memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi.
2. Faktor karakteristik pribadi
 - a. Usia, semakin tua usia seseorang maka besar kemungkinan untuk berpartisipasi
 - b. Pendidikan, seseorang dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi maka kemungkinan berpartisipasi juga besar
 - c. Status sosial ekonomi, semakin tinggi status sosial ekonomi masyarakat maka besar kemungkinan untuk berpartisipasi
 - d. Jenis kelamin, perempuan cenderung berpartisipasi lebih rendah dibanding laki-laki

3. Faktor Karakteristik Sosial

- a. Kelompok sosial, individu yang tergabung dalam suatu kelompok sosial tertentu cenderung memiliki tingkat partisipasi lebih tinggi
- b. Lingkungan tempat tinggal, kondisi tempat tinggal yang kondusif akan memberi kemungkinan partisipasi yang tinggi

4. Faktor karakteristik situasional

- a. Sistem Pemilihan Umum, sistem Pemilu yang demokratis cenderung mendorong peningkatan partisipasi dari masyarakat
- b. Kondisi politik, dengan kondisi politik yang stabil maka akan mendorong tingkat partisipasi masyarakat
- c. Kondisi ekonomi, kondisi ekonomi yang stabil dan baik akan mendorong partisipasi dari masyarakat.

Sedangkan menurut Miriam Budiardjo, faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik seseorang sebagai berikut :

- 1. Faktor sosial ekonomi yang meliputi tingkat pendidikan, pendapatan, ras, pekerjaan, status, usia, jenis kelamin, dan organisasi.
- 2. Faktor politik yang meliputi :
 - a. Komunikasi politik yang dapat mengatur terkait sikap seseorang dalam suatu konflik.
 - b. Kesadaran politik masyarakat serta perhatiannya terhadap pemerintah dan negara. Hal ini terkait dengan pengetahuan, minat dan juga perhatiannya pada kegiatan politik.
 - c. Pengetahuan masyarakat mengenai proses pengambilan keputusan yang akan berpengaruh terhadap keputusan yang akan diambil.

- d. Kontrol masyarakat terhadap kebijakan publik. Hal ini berarti bahwa masyarakat mempunyai wewenang dalam mengelola kebijakan publik, untuk dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
3. Faktor fisik individu yang berkaitan dengan fasilitas serta ketersediaan bagi pelayanan umum. Kemudian faktor lingkungan yang berkaitan dengan kondisi, keadaan, kesatuan ruang dan benda serta dalam proses berlangsungnya interaksi sosial.
4. Faktor nilai budaya, yang merupakan dasar dalam membentuk demokrasi.

1.6.2 Hak pilih

Hak pilih merupakan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan menjadi hak yang penting karena memungkinkan warga negara untuk dapat menyuarakan pendapatnya dan mempengaruhi kebijakan pemerintah (Khairul, 2019). Hak pilih menjadi salah satu bentuk hak asasi manusia yang fundamental. Terdapat unsur-unsur penting dalam hak pilih :

- a. Universalitas : hak pilih bersifat universal, artinya setiap warga berhak untuk memilih dan dipilih, tanpa memandang ras, agama, gender, suku, atau status sosial.
- b. Kerahasiaan : hak pilih bersifat rahasia, artinya suara pemilih tidak boleh diketahui oleh siapapun.
- c. Kebebasan : hak pilih bersifat bebas, artinya tidak ada paksaan bagi pemilih dalam memilih atau tidak memilih calon tertentu.
- d. Kesenjangan : hak pilih bersifat setara, artinya setiap pemilih memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih

Fungsi hak pilih :

- a. Fungsi demokratis : hak pilih menjadi salah satu pilar dalam demokrasi, melalui hak ini maka memungkinkan warga untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Fungsi perwakilan : hak pilih memungkinkan warga untuk memilih perwakilannya di lembaga perwakilan rakyat.
- c. Fungsi kontrol : hak pilih warga memungkinkan untuk mengontrol kinerja dari pemerintah.

Adapun argumen spesifik untuk mendukung hak pilih menurut (Jean Jacques Rousseau, 1762) pada karyanya “The Social Contract, or Principle of Political Right” :

- a. Hak pilih merupakan hak alami bagi individu, semua orang memiliki hak alami untuk hidup, mendapat kebebasan, dan kepemilikan. Hak ini dapat dilindung jika orang memiliki suara dalam pemerintahan.
- b. Hak pilih diperlukan dalam menciptakan pemerintahan yang sah. Pemerintahan hanya akan sah jika didasarkan pada persetujuan yang diperintah. Rakyat harus memiliki hak untuk memilih pemerintah mereka dan menggantinya jika mereka merasa tidak puas.
- c. Hak pilih diperlukan untuk memastikan bahwa pemerintah melayani kepentingan rakyat. Melalui hak pilih maka dapat digunakan sebagai cara untuk memastikan apakah pemerintah mendengarkan dan menanggapi keinginan rakyat.

Dalam Pemilihan Umum, warga negara memiliki hak untuk ikut serta berpartisipasi yang disebut sebagai hak pilih. Hak pilih ini terdiri dari hak pilih aktif (memilih) dan hak dipilih (hak pilih pasif) (C.S.T. Kansil, 1986: 2-5)

a. Hak memilih atau hak pilih aktif

Hak memilih merupakan hak bagi warga negara untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum, baik Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden, legislatif, pemilihan kepala daerah maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Ramlah Surbakti, 2007: 145)

b. Hak pilih pasif

Hak pilih merupakan hak warga negara untuk dipilih dalam suatu Pemilihan Umum sebagai anggota Perwakilan Rakyat atau Badan Permusyawaratan.

1.6.3 Mobile Voters

Kelompok dengan partisipasi paling rendah sebagian besar diakibatkan oleh mereka yang melakukan pindah tempat tinggal sementara atau biasa dikenal di Indonesia sebagai kegiatan merantau. Persyaratan bagi mereka yang harus mendaftar ulang dalam setiap Pemilu ketika mereka pindah tempat tinggal menjadi salah satu faktornya. Penelitian terbaru yang menggunakan eksperimen lapangan untuk mengevaluasi strategi mobilisasi pemilih menunjukkan bahwa komunikasi yang mendorong pemberian suara dapat berhasil meningkatkan jumlah pemilih dalam berbagai situasi pemilu (Green dan Gerber, 2008).

Teori pemilih yang berpindah dalam Pemilu adalah teori yang menjelaskan bagaimana mobilitas penduduk dapat mempengaruhi hasil Pemilihan Umum (Thomas Schelling, 1971). Pemilih akan cenderung memilih kandidat yang

mewakili kepentingan mereka. Jika pemilih merasa bahwa kandidat yang mereka inginkan tidak memiliki peluang untuk menang, mereka mungkin akan memilih untuk pindah ke daerah yang lebih mendukung kandidat tersebut. Hal ini dapat menyebabkan perubahan hasil Pemilu. Dalam teori *mobile voters* memiliki implikasi penting bagi demokrasi. Teori ini menunjukkan bahwa mobilitas penduduk dapat digunakan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk mempengaruhi hasil Pemilu. Hal ini dapat menimbulkan risiko bagi demokrasi, karena dapat membuat hasil Pemilu tidak mencerminkan suara rakyat secara keseluruhan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi mobilitas pemilih :

1. Kepentingan politik, pemilih akan cenderung pindah ke daerah yang lebih besar mendukung kandidat yang mewakili kepentingan mereka
2. Harga rumah, pemilih akan cenderung pindah ke daerah yang memiliki harga rumah yang lebih terjangkau
3. Kualitas hidup, pemilih akan cenderung pindah ke daerah yang memiliki kualitas hidup yang lebih baik.

Kualitas hidup menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi mobilitas pemilih, masyarakat yang merasa tidak puas dengan kualitas hidup yang mereka dapatkan disuatu tempat akan cenderung untuk pindah ke tempat yang lain (Sofyan Effendi, 2018)

Langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mengurangi mobilitas pemilih :

1. Memberikan subsidi perumahan untuk pemilih yang ingin tinggal di daerah yang kurang mendukung kandidat pilihan mereka
2. Meningkatkan kualitas hidup di daerah-daerah yang kurang berkembang

3. Mendorong pemilih untuk berpartisipasi dalam Pemilu, terlepas dari peluang kandidat pilihan mereka untuk menang.

Mobilitas pemilih dapat menjadi faktor yang penting dalam menentukan hasil Pemilu. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi mobilitas pemilih agar dapat meminimalkan dampak negatifnya bagi demokrasi.

1.7 Operasionalisasi Konsep

1.7.1 Partisipasi Politik dalam Pemilu

Partisipasi politik merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik atau kebijakan dari pemerintah. Salah satu bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh individu atau warga secara personal adalah dalam kegiatan pesta demokrasi atau dalam pemilihan. Dengan partisipasinya dalam pemilihan ini, berarti warga ikut serta dalam mempengaruhi keputusan dan juga kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah kedepannya. Sebab, dengan adanya pemilihan akan ada sosok pemimpin baru yang pastinya memiliki visi misi baru dan akan ada kebijakan baru pula. Asumsinya adalah yang paling paham atau tahu akan keinginan dari masyarakat adalah mereka (masyarakat) itu sendiri, maka dari itu partisipasi ini menjadi hal yang penting bagi setiap individu karena sangat berperan bagi pemerintah untuk dapat menentukan kebijakan yang akan dibuat.

Pada dasarnya kesuksesan pelaksanaan Pemilu ditentukan salah satunya oleh pemilih atau konstituen yang merupakan salah satu bentuk karakteristik pemerintah yang demokrasi yaitu bentuk pemerintahan yang didasarkan oleh partisipasi dari

masyarakat sebagai sarana kedaulatan rakyat yang memilih dan menentukan pejabat politik baik ditingkat nasional maupun tingkat daerah melalui Pemilihan Umum.

Bentuk partisipasi politik yang dapat diberikan oleh masyarakat diantaranya mulai dari kampanye, menjadi anggota partai politik, hingga memberikan suara dalam Pemilu. Dalam konteks penelitian ini partisipasi masyarakat dalam memberikan suara menjadi satu hal penting karena dengan tingginya partisipasi pemilih maka dapat dimaknai sebagai penerimaan masyarakat terhadap penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Sebaliknya, jika partisipasi rendah maka hal itu menunjukkan bentuk ketidakpercayaan serta merupakan bentuk apatis dari masyarakat terhadap proses politik.

Partisipasi pemilih atau voter turnout ini merupakan suatu bentuk partisipasi politik dalam Pemilihan Umum melalui proses perhitungan persentase orang yang menggunakan hak pilihnya di Pemilu, dibandingkan dengan jumlah warga yang berhak memilih. Kehadiran serta penggunaan hak memilih menjadi salah satu unsur yang penting dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemilu, hal ini dipengaruhi atas dasar motivasi dari setiap individu untuk memilih, kemampuan untuk memilih maupun kesulitan yang dialami individu dalam memilih. Voter turnout ini penulis pilih sebagai fokus penelitian sebab voter turnout dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Kabupaten Wonogiri menjadi isu yang cukup krusial karena dilaksanakan saat pandemi Covid 19 berlangsung.

1.7.2 Kaum boro

Kaum boro merupakan sebutan bagi warga Wonogiri yang merantau. Kata “boro” disini berasal dari kata “ngalemboro” yang berarti mengembara. ‘Boro’ juga dapat diartikan sebagai warga yang sedang merantau untuk keperluan tertentu (biasanya dilakukan untuk mencari pekerjaan). Namun, biasanya sebutan kaum boro bagi warga ini merupakan sebutan untuk warga yang merantau dalam jangka waktu tertentu, jadi warga tersebut tidak tinggal di perantauan secara permanen dan masih ber-KTP di daerah asalnya.

Warga sebagai kaum boro ini biasaya akan merantau di tempat atau kota-kota besar di Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Dalam fokus penelitian ini adalah warga Wonogiri yang merantau ke luar daerah baik untuk bekerja mencari nafkah maupun untuk mengenyam pendidikan.

Beberapa ciri-ciri Kaum Boro :

- Warga dengan KTP Wonogiri namun tinggal di perantauan
- Pulang kampung atau mudik terutama saat lebaran, rata-rata dalam satu tahun hanya pulang kampung 1-2 kali.

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dan prosedur yang dilakukan guna untuk mengumpulkan berbagai informasi dan data agar tercapainya tujuan serta dapat menentukan jawaban terhadap masalah yang diajukan. Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai cara ilmiah bagi penulis untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2017).

1.8.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian jenis kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian jenis deskriptif kualitatif ini menampilkan data apa adanya berdasarkan sumber yang telah ditemukan tanpa adanya manipulasi. Data dapat disajikan dalam bentuk tabel, diagram, grafik, dan lain-lain. Penelitian ini dilakukan dengan membuat deskripsi dan gambaran terkait bagaimana partisipasi dan penggunaan hak suara masyarakat Kabupaten Wonogiri yang merantau di daerah Jabodetabek pada saat pelaksanaan Pilkada Tahun 2020. Dalam studi ini pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* yang melibatkan para pihak yang memiliki keterikatan dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020.

1.8.2 Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah, dengan subjek penelitian yaitu masyarakat Wonogiri yang merantau khususnya pada tahun 2020 dan merupakan kategori masyarakat yang memenuhi syarat sebagai pemilih pada tahun tersebut. Tahun saat Pemilihan kepala daerah Kabupaten Wonogiri.

1.8.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan melalui responden-responden terkait serta dari dokumen-dokumen untuk melengkapi penelitian.

a. Data primer

Merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi, survei, dan

wawancara. Dalam penelitian ini data primer yang diambil langsung dari lapangan yaitu berlokasi di Kabupaten Wonogiri Provinsi Jawa Tengah.

b. Data sekunder

Merupakan data yang diambil secara tidak langsung melalui media perantara. Dalam hal ini penulis mengambil data dari data kepustakaan, yang berasal dari membaca berbagai referensi-referensi, literatur, media massa, internet, dan buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas pada penelitian ini. Data yang penulis ambil berasal dari data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait data jumlah pemilih tetap dan data pengguna hak pilih pada Pilkada tahun 2020 Kabupaten Wonogiri.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Bentuk pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber. Wawancara dilakukan guna mendapatkan data-data berupa informasi dari pihak yang memang memiliki informasi terkait permasalahan penelitian yang diangkat. Bentuk pengambilan data melalui kuesioner dengan jawaban terbuka, sehingga dapat memberikan keleluasaan waktu informan untuk memberikan jawaban. Wawancara dilakukan kepada masyarakat Wonogiri yang merantau sejak tahun 2020 atau sebelum tahun tersebut, yang masuk dalam kategori sebagai pemilih atau yang sudah tercatat sebagai pemilih di daftar pemilih tetap Kabupaten Wonogiri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang didapatkan melalui dokumen-dokumen pendukung, baik melalui jurnal, buku, arsip, penelitian terdahulu, berita, majalah, dan lain-lain. Melalui teknik dokumentasi ini penulis akan

mendapat data-data valid dan akurat sehingga akan mempermudah menjalankan penelitian.

1.8.5 Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyusunan, pengumpulan, dan seleksi data yang dilakukan secara sistematis melalui data yang sudah diperoleh berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi melalui berbagai sumber relevan sehingga lebih mudah untuk dipahami dan temuannya dapat disampaikan kepada orang lain. Analisis data pada penelitian kualitatif secara umum dilakukan beberapa langkah sebagai berikut ini :

- a. Reduksi data, merupakan proses pengerucutan data, jadi penulis harus memilih serta menyeleksi setiap data yang sudah diperoleh dari hasil wawancara maupun dokumentasi kemudian diolah dan lebih difokuskan pada pokok pembahasannya yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
- b. Penyajian data, tahap selanjutnya adalah menyajikan data secara visual agar data lebih mudah untuk dipahami.
- c. Penarikan kesimpulan, merupakan tahap terakhir yang dilakukan, yaitu proses peninjauan ulang pada catatan dan data yang telah dikumpulkan sehingga memperoleh kesimpulan dari masalah yang diteliti.